



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah

Alamat : JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 1084/054/SK/BKPSDMD/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa perumusan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang harus mendukung Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang dan disusun secara berjenjang dari level kinerja kota sampai level staf dan /atau pejabat fungsional, dimana level kinerja bawah merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja di atasnya yang disusun dalam bentuk pohon kinerja;
- b. bahwa penyusunan pohon kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

- KESATU : Pohon Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : September 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG



EKO BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19641027 198503 1 004

[illegible]

Indikator
Jumlah dokumen DPA BCPSPMD yang teresane
Target
2021: 1 Dokumen 2022: 1 Dokumen 2023: 1 Dokumen
Sub Kegiatan 1.1.4
Koordinasi dan pengendalian dokumen perubahan DPA-BKPD
Sasaran
Terlaksananya dokumen perubahan DPA BCPSPMD
Indikator
Jumlah dokumen perubahan DPA BCPSPMD yang teresane
Target
2021: 1 Dokumen 2022: 1 Dokumen 2023: 1 Dokumen
Sub Kegiatan 1.1.5
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama BKPD
Sasaran
Terlaksananya pengawasan dokumen evaluasi perangkat daerah
Indikator
Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator kinerja utama (LKCU, LAKP, AKU, LKPU) yang teresane
Target
2021: 2 Dokumen 2022: 2 Dokumen 2023: 2 Dokumen
Sub Kegiatan 1.1.6
Evaluasi kinerja perangkat daerah
Sasaran
Terlaksananya pengawasan dokumen evaluasi perangkat daerah
Indikator
Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang teresane (dikemas SPKP, LAKIP, dan KSI)
Target
2021: 1 Dokumen 2022: 1 Dokumen 2023: 1 Dokumen

Indikator
Jumlah dokumen perubahan dan pengantarkabupaten keuang DPO
Target
2021: 1 Dokumen 2022: 1 Dokumen 2023: 1 Dokumen
Sub Kegiatan 1.1.10
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BKPD
Sasaran
Terlaksananya laporan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran BKPD
Indikator
Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran BKPD
Target
2021: 1 Laporan 2022: 1 Laporan 2023: 1 Laporan
Sub Kegiatan 1.1.11
Koordinasi dan pengawasan laporan keuangan indikator utama BKPD
Sasaran
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akurasi Tahun
Indikator
Jumlah laporan keuangan indikator utama BKPD
Target
2021: 1 Laporan 2022: 1 Laporan 2023: 1 Laporan
Sub Kegiatan 1.1.12
Pengadaan Bahan Pengadaan Bahan
Sasaran
Terlaksananya dokumen anggaran pembelian
Indikator
Jumlah Dokumen Pengadaan Pembelian
Target
2021: 1 Dokumen 2022: 1 Dokumen 2023: 1 Dokumen
Sub Kegiatan 1.1.13
Koordinasi dan pengawasan laporan keuangan pelaksanaan/terbaca/nya anggaran BKPD
Sasaran
Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran
Indikator
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran BKPD
Target
2021: 1 Laporan 2022: 1 Laporan 2023: 1 Laporan

Indikator
Jumlah laporan barang milik daerah yang diterima
Target
2021: 1 Laporan 2022: 1 Laporan 2023: 1 Laporan

Indikator
Jumlah Perbaikan Pemasangan Tenda yang diterima
Target
2021: 11 Set 2022: 12 Set 2023: 12 Set
Sub Kegiatan 1.1.4
Pengadaan bahan logistik kantor
Sasaran
Terlaksananya layanan Pengadaan bahan logistik Kantor
Indikator
Jumlah jasa bahan logistik yang diterima
Target
2021: 4 Jasa 2022: 4 Jasa 2023: 4 Jasa
Sub Kegiatan 1.1.5
Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian
Sasaran
Terlaksananya layanan Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian
Indikator
Jumlah barang Cetak dan Penggantian yang diterima
Target
2021: 14 Set 2022: 14 Set 2023: 14 Set
Sub Kegiatan 1.1.6
Pengadaan Bahan Baku dan Pemasangan Pemasangan
Sasaran
Terlaksananya layanan Pengadaan Bahan Baku dan Pemasangan
Indikator
Jumlah Bahan Baku dan Pemasangan yang diterima
Target
2021: 3 Kori 2022: 3 Kori 2023: 3 Kori
Sub Kegiatan 1.1.7
Pengelolaan dan Koordinasi dan Koordinasi SKPD
Sasaran
Terlaksananya layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Koordinasi
Indikator
Jumlah Koordinasi dan Koordinasi yang diterima
Target
2021: 10 Kali 2022: 10 Kali 2023: 10 Kali
Sub Kegiatan 1.1.8
Pengelolaan dan Koordinasi dan Koordinasi SKPD
Sasaran
Terlaksananya layanan Pengadaan dan Pemasangan
Indikator
Jumlah barang yang diterima
Target
2021: 5 Barak 2022: 5 Barak 2023: 5 Barak

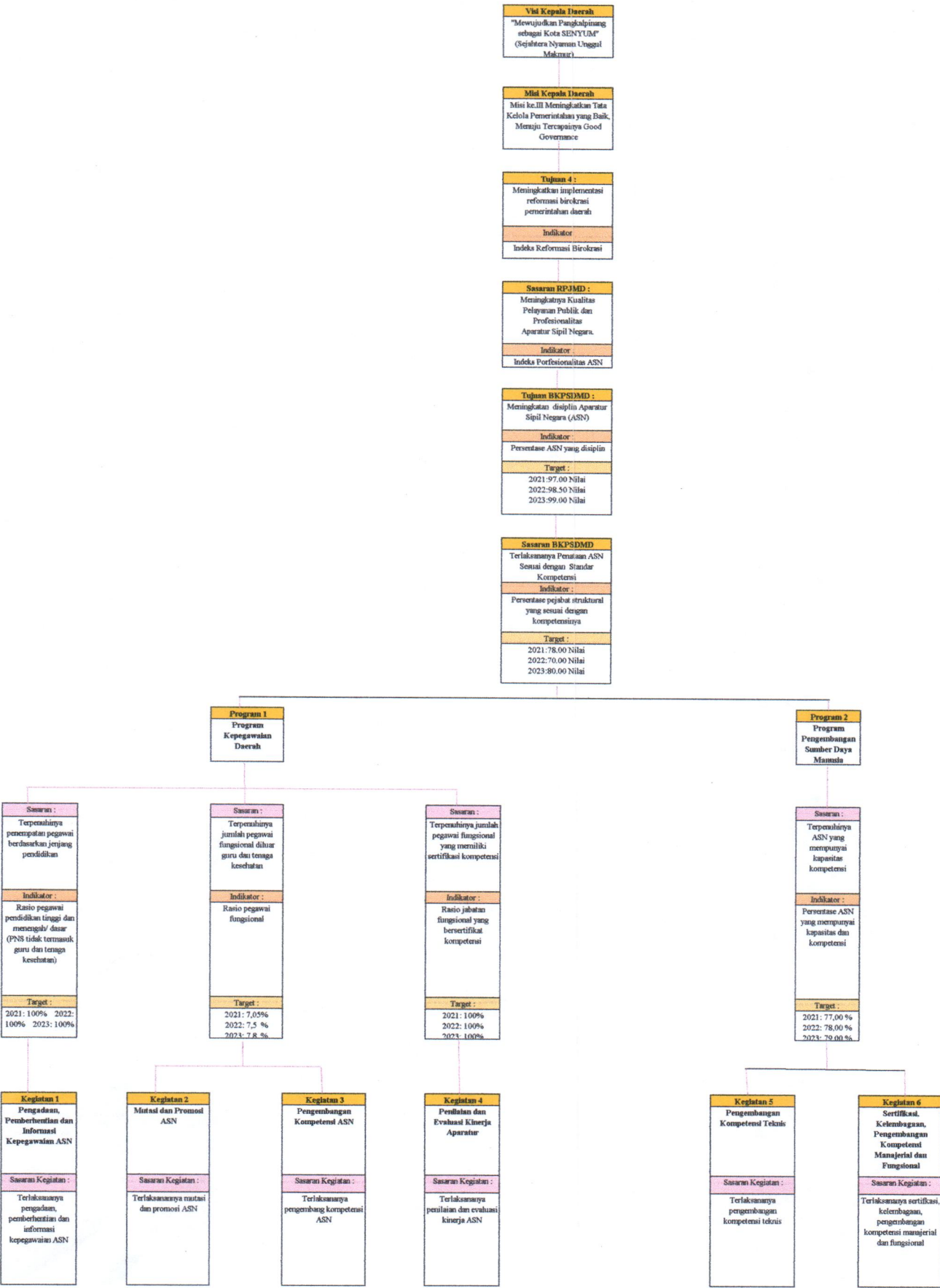
Indikator
Jumlah operasi internal BCPSPMD yang teresane
Target
2021: 46 Orang 2022: 46 Orang 2023: 46 Orang
Sub Kegiatan 1.1.12
Pengadaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor
Sasaran
Terlaksananya layanan jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
Target
2021: 12 Unit 2022: 26 Unit 2023: 15 Unit
Sub Kegiatan 1.1.13
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran
Terlaksananya layanan jasa pelayanan umum kantor
Indikator
Jumlah operasi internal BCPSPMD yang teresane
Target
2021: 46 Orang 2022: 46 Orang 2023: 46 Orang

Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 4 Unit 2022: 4 Unit 2023: 4 Unit
Sub Kegiatan 1.1.4
Pengadaan Asat Tetap Lainnya
Sasaran
Terlaksananya aset tetap lainnya
Indikator
Jumlah Asat Tetap Lainnya yang diterima
Target
2021: 2 Unit 2022: 2 Unit 2023: 2 Unit
Sub Kegiatan 1.1.5
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diterima (termasuk tanah dan bangunan)
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diterima (termasuk tanah dan bangunan)
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit
Sub Kegiatan 1.1.6
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diterima
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit

Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 4 Unit 2022: 4 Unit 2023: 4 Unit
Sub Kegiatan 1.1.10
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit
Sub Kegiatan 1.1.11
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit
Sub Kegiatan 1.1.12
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit
Sub Kegiatan 1.1.13
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 0 Unit 2022: 0 Unit 2023: 0 Unit

Indikator
Jumlah perbaikan dan operasi internal yang diterima
Target
2021: 46 Set 2022: 47 Set 2023: 46 Set
Sub Kegiatan 1.1.4
Pengadaan Peralatan yang diterima dalam Mekanisme Taper
Sasaran
Terlaksananya Peralatan yang diterima dalam Mekanisme Taper
Indikator
Jumlah Peralatan ASN yang diterima
Target
2021: 2 Orang 2022: 2 Orang 2023: 2 Orang
Sub Kegiatan 1.1.5
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Sasaran
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diterima
Target
2021: 1 Orang 2022: 1 Orang 2023: 1 Orang

POHON KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2021



Indikator :
Persentase pelaksanaan pengaduan, pemberitahuan dan pemberian informasi kepegawaian ASN
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Indikator :
Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Indikator :
Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Indikator :
Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Indikator :
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Indikator :
Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
Target :
2021: 100% 2022: 100% 2023: 100%

Sub Kegiatan 1.3.1
Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengaduan ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya ASN yang lulus sesuai format yang diajukan
Indikator :
Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan format yang diajukan
Target :
2021: 200 Orang 2022: 165 Orang 2023: 165 Orang
Sub Kegiatan 1.3.2
Koordinasi dan fasilitasi Pengaduan PNS dan PPPK
Sasaran sub Kegiatan :
Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN
Indikator :
Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN
Target :
2021: 150 Orang 2022: 165 Orang 2023: 165 Orang
Sub Kegiatan 1.3.3
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya SK penutan yang diterbitkan
Indikator :
Jumlah SK penutan yang diterbitkan
Target :
2021: 100 Orang 2022: 100 Orang 2023: 110 Orang

Sub Kegiatan 1.2.1
Pengelolaan Mutasi ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi
Indikator :
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi
Target :
2021: 15 Orang 2022: 20 Orang 2023: 25 Orang
Sub Kegiatan 1.2.2
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya SK Pangkat ASN yang diterbitkan
Indikator :
Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan
Target :
2021: 600 Orang 2022: 600 Orang 2023: 600 Orang
Sub Kegiatan 1.2.3
Pengelolaan promosi ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya pelaksanaan pemberian karir PNS
Indikator :
Jumlah pelaksanaan Pemberian Karir PNS
Target :
2021: 6 Kali 2022: 6 Kali 2023: 6 Kali

Sub Kegiatan 1.3.1
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dasar dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN
Indikator :
Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dasar dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN
Target :
2021: 50 Orang 2022: 100 Orang 2023: 125 Orang
Sub Kegiatan 1.3.2
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Indikator :
Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan
Target :
2021: 0 Orang 2022: 100 Orang 2023: 100 Orang
Sub Kegiatan 1.3.3
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya ASN Penakot Pengalihpiutang yang menerima bantuan biaya tugas belajar
Indikator :
Jumlah ASN Penakot Pengalihpiutang yang menerima bantuan biaya tugas belajar
Target :
2021: 5 Orang 2022: 10 Orang 2023: 15 Orang

Sub Kegiatan 1.4.1
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja operator
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja operator
Indikator :
Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja operator
Target :
2021: 3000 Orang 2022: 3000 Orang 2023: 3075 Orang
Sub Kegiatan 1.4.2
Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya ASN yang menerima penghargaan
Indikator :
Jumlah ASN yang menerima penghargaan
Target :
2021: 200 Orang 2022: 200 Orang 2023: 200 Orang
Sub Kegiatan 1.4.3
Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya penyelesaian kasus ASN yang indisipliner
Indikator :
Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner
Target :
2021: 5 Kasus 2022: 5 Kasus 2023: 5 Kasus

Sub Kegiatan 2.5.1
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran sub Kegiatan :
Terpenuhinya ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi
Indikator :
Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi
Target :
2021: 100 Orang 2022: 100 Orang 2023: 125 Orang

Sub Kegiatan 2.6.1
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Sasaran sub Kegiatan :
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Indikator :
Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan pra jabatan
Target :
2021: 20 Orang 2022: 150 Orang 2023: 30 Orang

Sub Kegiatan 1.1.4
Facilitasi lembaga pemberi ASN
Sasaran sub Kegiatan
Terdistribusinya pelayanan HUT KEMPRU
Indikator
Jumlah pelayanan penerima HUT KEMPRU
TARGET
2021: 3 Event 2022: 3 Event 2023: 3 Event
Sub Kegiatan 1.1.5
Pemertan bahan kebijakan pengalihan data dan informasi ASN
Sasaran sub Kegiatan
Tersedianya data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-mob
Indikator
Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-mob
TARGET
2021: 3000 Data 2022: 3000 Data 2023: 3000 Data
Sub Kegiatan 1.1.6
Pengalihan Sistem Informasi Kepegawaian
Sasaran sub Kegiatan
Terdistribusinya pengalihan data kepegawaian website
Indikator
Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan
TARGET
2021: 1 Website 2022: 1 Website 2023: 1 Website
Sub Kegiatan 1.1.7
Pengalihan Data Kepegawaian
Sasaran sub Kegiatan
Terdistribusinya pengalihan data kepegawaian
Indikator
Jumlah data kepegawaian yang dikelola
TARGET
2021: 200 Orang 2022: 250 Orang 2023: 300 Orang

Sub Kegiatan 1.3.4
Facilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional
Sasaran sub Kegiatan
Tersedianya ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional
Indikator
Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional
TARGET
2021: 30 Orang 2022: 30 Orang 2023: 30 Orang

